

BAB V

POKOK-POKOK TEMUAN DAN PEMBAHASAN TEMUAN PENELITIAN

Pada Bab IV dikemukakan deskripsi hasil penelitian atau potret lapangan baik berupa data, informasi, pernyataan, gejala, kecenderungan-kecenderungan, dan interpretasi tentang hal-hal yang berpengaruh terhadap pengelolaan pendidikan di suatu daerah. Data tersebut masih harus dimaknai lebih lanjut guna menemukan petunjuk ke arah tujuan penelitian, yaitu untuk merumuskan model intervensi perencanaan strategis bagi penuntasan Wajar dan peningkatan mutu Dikdas.

A. Pokok-pokok Temuan Penelitian

Pokok-pokok temuan penelitian disajikan menurut segi-segi kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*) internal, serta peluang (*Opportunity*) dan tantangan (*Threath*) eksternal dalam implementasi perencanaan dan manajemen pendidikan dasar dan menengah, antara lain berkaitan dengan :

- a. Peluang dan tantangan eksternal sistem perencanaan Dikdas guna mendukung upaya penuntasan Wajar dan peningkatan mutu Dikdas, terutama dalam kaitannya dengan keadaan: (1) geografis; (2) pemerintahan; (3) kependudukan; (4) ekonomi dan ketenagakerjaan; (5) sosial-budaya dan keagamaan; serta (6) sarana transportasi dan komunikasi.
- b. Kekuatan dan kelemahan internal sistem perencanaan Dikdas dalam upaya penuntasan Wajar dan peningkatan mutu Dikdas, terutama sehubungan dengan: (1) tingkat partisipasi pendidikan, aspirasi melanjutkan, serta rasio pendayagunaan sarana dan tenaga kependidikan pada jenjang Dikdas; (2) akurasi data dan informasi dalam perencanaan Dikdas; (3) struktur organisasi dan kinerja tim koordinasi Wajar Dikdas; dan (4) implementasi sistem perencanaan kelembagaan pendidikan, khususnya SLTP.

Matrik 5.1

PELUANG DAN TANTANGAN EKSTERNAL SISTEM PENDIDIKAN

ASPEK	PELUANG	TANTANGAN
<p>Eksternal Sisdik: 1. Geografis</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Luas wilayah per Dati II : BU : 9.585 km² RL : 4.111 km² BS : 5.949 km² Kod : 145 km² (Tanah relatif luas dan subur) -Banyak alternatif lokasi untuk sekolah baru. -Harga tanah relatif murah. -Relatif mudah untuk mengadakan penataan sekolah. -Lahan kering : 96,36% -50,58% dapat dibudidayakan. 	<ul style="list-style-type: none"> -Berbukit/lembah, dengan kemiringan < 40° -Pesisir, / pantai barat pulau Sumatra -Pegunungan/lamping Bukit Barisan. -Luas wilayah antar daerah tidak merata -Luas Desa di 3 Kec. : Talo/BS : 17 - 526 Ket./BU : 11,0 - 62 PUT/RL : 1,0 - 30,5 Kesejangan luas tertinggi di Talo-BS; Profil umum Ketahun Bengkulu utara. -Antara sekolah dengan pemukiman banyak kendala alam. -Sekolah belum berdaya mengoptimalkan lahan yang ada.
<p>2. Pemerintahan</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Pembagian wilayah: Dati II : 4 buah Kecamatan : 31 buah Kelurahan : 79 buah Desa : 1.004 buah -Desa menurut klasifikasinya: Swadaya : 12 buah Swakarya : 258 buah Swasembada : 803 buah 	<ul style="list-style-type: none"> -Desa/Kel: 74,15% Swasembada 24,75% Swakarya 1,10% Swadaya -Bengkulu Utara: Jumlah kecamatan & desa terbanyak, kelurahan sedikit. -Kemampuan Pemda dan masyarakat dalam membiayai pendidikan sangat minim.



ASPEK	PELUANG	TANTANGAN
	<p>-Komitmen Pemde untuk pengembangan sekolah cukup baik.</p> <p>-Rasio layanan pemerintahan di tiap daerah cukup tinggi, dibanding jumlah penduduk yang dilayaninya.</p>	<p>-Koordinasi antar sektor pemerintahan kurang terjalin dengan baik.</p>
3. Kependudukan	<p>-Jumlah penduduk relatif sedikit dibanding dengan potensi daerah yang harus dikelola.</p> <p>-Penduduk Transmigran mampu menularkan kebiasaan positif.</p> <p>-Aspirasi pendidikan meningkat.</p> <p>-Angka kelahiran menurun.</p> <p>-Jumlah Penduduk Bengkulu: 1.375.894 (1995)</p> <p>-Pend. Usia 15-64 thn: 1990 = 55,81% 1995 = 57,82%</p> <p>Usia produktif lebih banyak dari non-produktif</p> <p>-Rata-rata kepadatan penduduk Prop. Bengkulu 69 jiwa/km².</p> <p>-Transmigrasi: berpeluang meningkatkan aspirasi, partisipasi pendidikan, dan dapat menularkan sikap hidup positif.</p>	<p>-Pertumbuhan pend.: 5,32%/tahun (71-80) 5,35%/tahun (81-90) 3,34%/tahun (91-95)</p> <p>-Angka kematian bayi menurun.</p> <p>-Anak lahir hidup dan harapan hidup meningkat.</p> <p>-Penduduk usia 0-14: 1990 = 41,38% 1995 = 39,40%</p> <p>-Kepadatan penduduk dan persebarannya "Tidak merata"</p> <p>Kodya 1.681 jiwa/km²; RL. 94 jiwa/km² B.Sel. 53 jiwa/km²; B.Utara 45 jiwa/km²</p> <p>-Tingkat pendidikan penduduk relatif rendah.</p> <p>-Pendidikan penduduk usia 10 tahun ke atas relatif rendah : Blm Tmt SD41,08%</p> <p>Tamat SD = 29,89% Tamat SLTP = 12,78% Tamat SLTA = 12,95% Tamat AK/PT = 2,29%</p>

ASPEK	PELUANG	TANTANGAN
<p>4. Ekonomi & Ketengakerjaan</p>	<p>-Pertumbuhan ekonomi 14,20% tahun, di atas rata-rata nasional. -Sektor ekonomi unggulan : "Pertanian" -Industri berpeluang dikembangkan, terutama Ind. pengolahan pasca panen. -Lapangan kerja: Pertanian : 64,39% J a s a : 14,68% Perdagangan : 11,91% Industri : 2,02% Bangunan : 1,81% -Pertanian: tanaman pangan turun 2,46%, tanaman Palawija naik -Perkebunan : Sebagian besar kebun rakyat (kopi dan karet) Sebagian kecil PTP atau PIR (coklat dan kelapa sawit). -Perikanan (Jenis/Prod/dan kenaikan): Laut 14,5 ton / 9,68% Darat 5 ton / 205,45% -Angk. Kerja: 63,55% AK Bekerja 61,35% -Bukan AK. 36,45% (Sekolah, RT, lainnya)</p>	<p>-Sebaran penduduk tidak merata terutama di Tk. Desa, dengan variasi kepadatan: Talo/BS 0,5-947/km² Ket./BU 5-267 /km² PU/RL 26-1.341/km²</p> <p>-Pertumbuhan industri lambat, karena investor sedikit yang mau menanam modal di Bengkulu. -Agroindustri belum memasyarakat. -Dukungan dunia usaha terhadap pendidikan relatif rendah. -Keterkaitan antara sekolah dengan dunia kerja perlu ditingkatkan. -Perkebunan rakyat kurang terawat. -Pemasaran hasil perkebunan masih dikuasai "tengkulak". -Kemitraan dengan PIR kurang didasari oleh sikap saling percaya dan saling menguntungkan. -Jaringan pemasaran masih terbatas. -Lap. Kerja Bidang pertanian menurun dari 70,71% (1990) menjadi 64,39% (1998) -PAK nganggur 5,19% -Pengeluaran Pend.: 68,47% untuk makanan 31,53% non-makanan</p>

ASPEK	PELUANG	TANTANGAN
		<ul style="list-style-type: none"> -Komoditi ekspor yang menurun: kopi 99,68%; karet 99,00%; coklat 10,59%; kayu olahan 99,95%) -Calon tenaga kerja, belum ditempatkan, menurut pendidikan: <ul style="list-style-type: none"> Belum SD 0,01% Tamat SD 48,35% Tamat SL.P 63,29% Tamat SMU 91,53% Tamat SMK 92,78% Tamat PT 98,59% -Dari 27.216 pelamar ditempatkan sebanyak 2.776 (10,20%) -Pekerja usia 10-14 th: Wanita 18% Pria 22% -Anak ikut ke ladang/hutan, yang jaraknya jauh dan terisolir. -Anak turut membantu pekerjaan orang tua.
5. Sosial Budaya & Keagamaan	<ul style="list-style-type: none"> -Sarana ibadah terus bertambah berupa: mesjid, langgar, gereja katolik, pure, & vihara kecuali gereja protestan berkurang 4 buah. -Pendidikan keagamaan dalam lingkungan keluarga / masyarakat potensial untuk dikembangkan melalui sarana ibadah yang ada. 	<ul style="list-style-type: none"> -Program pendidikan keagamaan di sekolah kurang/belum terkait implementasinya di luar jam sekolah. -Kesuburan lahan dan potensi alam cenderung diperlemah kinerja penduduk, karena dengan upaya yang minimal saja sudah dapat mencukupi keperluan hidupnya (cenderung malas).

ASPEK	PELUANG	TANTANGAN
	<p>-R. Lebong dan Kodya merupakan pengirim jamaah haji terbanyak (sekitar 80%). Memunculkan bahwa kesejahteraan masyarakat Bengkulu Selatan dan Utara berada di bawah kedua Kab./Kod. tersebut di atas.</p>	<p>-Jumlah pernikahan naik 22,37 % dari 9.9372 pasang pada tahun 1994 menjadi 11.469 pasang pada tahun 1995. Beberapa tahun mendatang pertambahan penduduk pasti cukup berarti.</p>
<p>6. Transportasi & Komunikasi</p>	<p>-Sarana transportasi antar propinsi cukup memadai, dan mengundang pendatang, terutama dari Padang, Medan, Palembang, Lampung, dan Jawa. -Jalan raya utama membentang dari selatan ke utara (sampai Padang) menghubungkan semua kecamatan yang ada. -Tersedia pelabuhan laut dan udara. -Menyediakan pondokan disekitar sekolah untuk menampung anak dari daerah terpencil/terisolir/jauh.</p>	<p>-Kecuali ke daerah terpencil/terisolir. -Jarak Desa ke Kec. dan dari Kec. ke Kab. relatif jauh & banyak terisolasi kond. alam. -Dalam lingkup Kecamatan dan Desa, sarana transportasi kurang memadai: =Kendaraan umum beroperasi 1 minggu 2 kali (hari pasar). =Jarak antar Desa dengan pusat kota relatif jauh. =Banyak desa yang terisolasi karena jarak dan kondisi alam =Kurang dari 59% jalan Desa belum dapat dilalui kendaraan.</p>

Matrik 5.2

KEKUATAN DAN KELEMAHAN INTERNAL, SISTEM PENDIDIKAN

ASPEK	KEKUATAN	KELEMAHAN
<p>Internal Sisdik: 1. Angka Partisipasi Pendidikan</p>	<p>-APM 7-12 = 96,53% -APK 7-12 = 104,56% -APM Prop.Bengkulu menjelang pencanangan wajar (1994) = 70,94% x 93,213 = 66.122 bersekolah; = 22.090 tak sekolah/DO/sekolah di luar -Kodya Bengkulu : APM = 80,89% APK = 90,16% -APM menurut oprasi sisir (1994)= 106,29% (Melebihi jumlah PUS karena banyak peserta didik dari luar kota, & fasilitas tersedia)</p>	<p>-PUS(7-12) = 210.221 -3,47% = 7.286 (BS) -APK 7-12 terendah di B. Utara (98,96%) -PU 13-15 Tahun: APM = 55,68% APK = 62,09% -APM/APK terendah: BU= 45,05%/ 48,19% RL= 49,03%/ 55,55% -Belum masuk SLTP: Propinsi Bengkulu = 44,32% x 108.578 = 48.127 orang. -APK SLTP/SLTA Tahun (80/90/94/95): SLP: 67,39; 79,18; 55,85; 62,60 SLA: 36,05; 56,33; 34,27; 39,44 -Perbedaan data, karena inkonsistensi pendataan dan formula yang digunakannya.</p>
<p>2. Aspirasi Melanjutkan a. Antar Daerah</p>	<p>-Melanjutkan: B. Selatan = 93,65% R. Lebong = 89,18% R. Utara = 78,37% -Daya tampung SLTP masih terbuka. -Makin dekat kota makin banyak yang melanjutkan -Makin padat penduduk makin tersedia tambahan pendidikan dan makin banyak yang lanjut.</p>	<p>-Makin jauh dari kota makin banyak yang tidak melanjutkan -Makin luas daerah makin banyak yang tidak melanjutkan -Kendala alam(Terpencil laut, Kec. Terluas, perbatasan wilayah, pegunungan, perkebunan) mempengaruhi tingkat melanjutkan. - Daya jangkau sekolah sangat minimal.</p>

ASPEK	KEKUATAN	KELEMAHAN
	<p>-Tiap kecamatan telah dirintis/dibuka : =SMP Induk =SMP Kecil =SMP Terbuka =SMP Kecil/Terbuka</p>	<p>-Tdk/blm.melanjutkan: B.S: 462 = 6,35% R.L: 894 = 10,82% B.U: 1.550 = 21,63% ----- Jml : 2.906 orang</p> <p>-Kec. rendah lanjut: Egn. 14 (37,84%) Mut. 409 (36,81%) Kth. 462 (32,06%) Phj. 101 (23,63%) -Lulusan SD/MI terpercil banyak tak lanjut: Kec./Lulusan/TL./% ; BS =274:102/37,23% RL= 415:164/39,52%; BU=204:115/58,33%</p>
b. Antar Waktu	<p>-Lulusan makin banyak -% lanjut makin baik: di SD: Thn./Lulusan/% lanjut = 90/91: 22.988: 74,15% = 95/96: 27.535: 85,16% di SLTP = 90/91: 12.711. 81,93% = 95/96: 12.080: 84,79%</p>	<p>-Perluasan kesempatan U/transisi: =UGB, RKB, SLTP Kecil, SLTP Terbuka U/Sisa Kumulatif: =PLS (Paket B/Kursus Magang, Sertifikasi, SLTP Terbuka)</p> <p>-Kumulatif tak melanjutkan dalam 6 Thn.: SD ke SLTP: Tak lanjut (Persen). 33.642 (22,67 %) SLTP ke SLTA: Tak lanjut (Persen). 23.830 (26,59 %)</p>

ASPEK	KEKUATAN	KELEMAHAN
<p>c. Elastisitas Ketena- gaan</p>	<p>-Murid SLTA: 282 / sekolah 33,46 / kelas 22,61/ guru 39,33 / ruang kelas -Baik di SLTP/SLTA: -Jumlah guru "cukup" atau masih dapat dioptimalkan. -Jumlah murid / kelas masih dapat ditingkatkan</p> <p>-Tenaga Administratif: Seluruhnya : 2.236 Gol IV = 35 (1,57) Gol III = 737(32,94) Gol II = 1.286(57,51) Gol I = 173 (7,74)</p> <p>-Tenaga Edukatif, Seluruhnya : 16.287 Gol IV = 59 (0,36) Gol III = 5.009 (30,76) Gol II = 11.129 (66,88)</p> <p>-Tenaga Edukatif, -Jumlah tenaga yang ada memadai, hanya pe- merataan dan penyebarannya perlu diatur ulang.</p>	<p>-Perlu optimalisasi penggunaan pegawai mela- lui pelatihan profesional. -Tak ada pengangkatan pegawai (adm) baru. -Masalah tampak pada pemerataan antar wila- yah, dan penyebaran menurut bidang tugasnya. -Perlu peningkatan kualifikasi pendidikan guru. -Diperlukan tambahan guru sesuai dengan program perluasan pemerataan, seperti tambahan UGB, RKB, dan peningkatan daya tampung sekolah.</p>

ASPEK	KEKUATAN	KELEMAHAN
<p>d. Rasio Pengawas</p>	<p>-Tiap Pengawas TK/SD rata-rata membina: 16,76 sekolah; 125,33 guru; 2.378 siswa; 105,32 kelas; dan 82,78 ruang kelas.</p> <p>-Tiap Pengawas SM rata-rata membina: 14,82 sekolah; 276,32 guru; 4.287 siswa; 113,82 kelas; 97,50 ruang kelas</p>	<p>-Dengan rasio 1:8-10, maka Bengkulu masih kekurangan pengawas TK/SD hingga 2 x dari jumlah yang ada.</p> <p>-Beban tugas pengawas “berlebihan”</p> <p>-Dengan rasio 1:8-10, maka Bengkulu masih kekurangan pengawas SM hingga lebih 2 x jumlah yang ada.</p>
<p>e. Rasio Guru</p>	<p>-SD: Guru Kelas = 7.726</p> <p>-Guru Agama = 1.140</p> <p>-Guru Penjas = 670</p> <p>-Jumlah Guru = 10.842</p>	<p>-SD: KS Kosong = 3 orang</p> <p>-Guru kelas : Guru kurang = 1.226 Guru lebih = 483* Perlu tambah = 743</p> <p>-Guru Agama: Guru kurang = 240 Guru lebih = 101* Perlu tambah = 139</p> <p>-Guru Penjas: Guru kurang = 619 Guru lebih = 36* Perlu tambah = 583</p> <hr/> <p>-Kurang semu = 2.088 -Lebih semu = 620 -Tambah = 1.468</p> <p>*Guru bidang lain : -Perlu pertukaran/mutasi-tukar. -Perlu peningkatan kualifikasi.</p>

ASPEK	KEKUATAN	KELEMAHAN
f. Pengadaan Pegawai	<p>-Di SLTP: Jumlah Guru: 3.098 Lebih Guru : 123</p> <p>-Di SLTA: Jumlah Guru : 1.178 Lebih guru lain2 : 96</p> <p>-Penggabatan tenaga edukatif tetap terbuka sesuai anggaran.</p> <p>-Jumlah yang diangkat golongan III cenderung makin banyak.</p>	<p>-Di SLTP: Guru lebih : 123 orang PMP : 39 Keterampilan : 17 Lain-lain : 67 ----- Guru krg : 1.403 orang</p> <p>-Di SLTA: Kurang guru pada 11 mata pelajaran: 308</p> <p>-Calon guru yang ada tak sesuai dengan yang dibutuhkan.</p>
g. Elastisitas pengelolaan fasilitas	<p>-Tiap SD memiliki: 5,45 Ruang kelas 28,74 Siswa/R.Kelas 158 Siswa/Sekolah</p> <p>-Tiap SLTP memiliki: 6,59 Ruang kelas 42,03 Siswa/R.Kelas</p> <p>-Tiap SLTA memiliki: 7,17 Ruang kelas 39,33 Siswa/R.Kelas</p>	<p>-Belum semua SD lengkap enam ruang kelas, tiap kelas yang ada digunakan 29 siswa.</p> <p>-Banyak SLTP yang harus mendapat tambahan ruang kelas.</p> <p>-Beberapa SLTA perlu tambahan ruang kelas baru, pemanfaatan kelas cukup, memungkinkan untuk digunakan dalam 2 shif.</p>

ASPEK	KEKUATAN	KELEMAHAN
<p>Implementasi Sispermen SLTP</p> <p>1. Umum</p>	<p>-Sekolah yang kinerjanya baik :</p> <p>=memiliki budaya/iklim yang kondusif bagi terciptanya persaingan dalam belajar.</p> <p>=dipimpin oleh K.S yang mempunyai visi dan misi yang jelas tentang sekolahnya.</p> <p>=KS yang kreatif dan dinamis.</p> <p>=KS menguasai bidang tugasnya; bertindak sebagai supervisor & fasilitator bagi guru.</p> <p>=sekolah cenderung digandrungi masyarakat & jadi sekolah favorit.</p>	<p>-Sekolah yang kinerjanya kurang baik:</p> <p>=budaya akademik sekolah kurang mendukung bagi terciptanya persaingan belajar.</p> <p>=KS belum mempunyai visi yang jelas tentang sekolahnya.</p> <p>=KS kurang kreatif dan tak dapat mengantisipasi kebutuhan warga sekolah atau pihak pe-makai.</p> <p>=sumberdaya penunjangnya serba minim.</p> <p>=secara umum siswanya berasal dari golongan menengah ke bawah.</p>
<p>2. Kesiswaan</p>	<p>-Sekolah yang kinerjanya baik:</p> <p>=menyeleksi calon siswa yang mempunyai NEM tinggi.</p> <p>=sebagian besar pendafar tidak tertampung.</p> <p>=semangat belajar siswa tinggi.</p> <p>=prestasi belajar siswa rata-rata baik.</p> <p>=siswa umumnya berasal dari keluarga berpendidikan cukup dan sosial-ekonomi menengah ke atas.</p> <p>=jumlah siswa sesuai dengan kapasitas sekolah (naik 3,06%/tahun)</p>	<p>-Sekolah yang kinerjanya kurang baik:</p> <p>=siswa yang masuk cenderung memiliki NEM rendah.</p> <p>=semua pendafar dapat diterima.</p> <p>=semangat belajar siswa "rendah".</p> <p>=prestasi belajar siswa umumnya "kurang".</p> <p>=umumnya siswa berasal dari keluarga berpendidikan rendah.</p> <p>=jumlah siswa cenderung melebihi kapasitas sekolah.</p>

ASPEK	KEKUATAN	KELEMAHAN
	<ul style="list-style-type: none"> =disiplin siswa baik. -transition rates mencapai 95,66% (tidak naik 4,4% dan d.o. 0,9%). -pendaftar bertambah 7,04% dan yg diterima bertambah 2,19%/tahun. 	<ul style="list-style-type: none"> =pendaftar ke SLTP swasta cend. berkurang. =disiplin kurang terbina, kelas sering bebas. -siswa diterima 65,3% dari jumlah pendaftar.
<p>3. Kurikulum & pengajaran</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Kelengkapan kurikulum di tiap sekolah cukup memadai, kualitas satpel, PBM, tindak lanjut atas hasil PBM bervariasi. -Pembagian tugas dan penyusunan jadwal sesuai dengan keadaan sekolah. -Penyelenggaraan muatan lokal sesuai dengan kebutuhan masyarakat (orang tua) dan potensi sekolah serta lingkungannya. -Menggunakan pendekatan yang bervariasi dalam mengajar. -Supervisi pengajaran dilaksanakan secara berkala oleh kepala sekolah dan pengawas. -target kurikulum tercapai antara 60-90%. -semua lulusan dapat melanjutkan ke SLTA. -Kelulusan dalam Ebtanas 89,43-99,43%. -pemberian pelajaran tambahan (les). -suasana belajar yang kompetitif. -Ketersediaan SLTA di dekat SLP mendorong minat siswa untuk melanjutkan. 	<p>Di sekolah yang kinerjanya "kurang baik":</p> <ul style="list-style-type: none"> -kualitas satpel, PBM, tindak lanjut atas hasil PBM perlu ditingkatkan. -penyelenggaraan muok yang kurang mendasar untuk masyarakat, dan kurang berarti bagi siswa & masyarakat. -Bagi sekolah yang kurang guru, dan berada di daerah tidak dapat mengikuti kegiatan MGMP. -target kurikulum tercapai antara 30-60%. -lulusan yang melanjutkan mencapai 74% -guru mengajar lebih dari satu mata pelajaran atau mengajar tidak sesuai latar belakang pendidikannya. -guru yang mengajar bukan bidangnya, dan mengajar dalam beberapa mata pelajaran. -input siswa bervariasi, yang cenderung memiliki NEM rendah. -suasana belajar kurang kompetitif.

ASPEK	KEKUATAN	KELEMAHAN
4. Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> -Tiap SLTP memiliki Lab. IPA, Perpustakaan, lapangan upacara, dan ruang kelas. -Pemfaatan fasilitas di SLTP yang kinerjanya baik telah optimal, dan pemeliharannya cukup memadai. -Sarana olah raga yang kurang dapat menggunakan fasilitas umum yang terdekat. 	<ul style="list-style-type: none"> -Di SLTP yang kinerjanya kurang baik: -Pemanfaatan fasilitas di SLTP yang kinerjanya kurang baik ternyata tidak optimal dan pemeliharannya kurang memadai. -tenaga khusus laboran dan pustakawan yang ada belum terlatih. -kebersihan kelas, lab, dan fasilitas lainnya kurang terjadi
5. Ketenagaan (Guru)	<ul style="list-style-type: none"> -Kecuali SLTP 3 Ketahun, jumlah guru SLTP sampel sudah cukup. -Sekolah yang ada di kota cenderung tidak pernah kekurangan guru, bahkan kalau dibebaskan mutasi. -Dari 292 orang guru, baru 43,4% saja yang telah memenuhi kualifikasi pend. D3/S1. -Sebagian besar guru telah berpengalaman, hanya sekitar 9,1% yg. pengalamannya kurang dari 7 tahun. -Guru bebas mengikuti berbagai kegiatan untuk mengembangkan profesinya. -Pengganti transpot sangat berarti guna memacu semangat kerja guru. 	<ul style="list-style-type: none"> -Hampir semua sekolah mempunyai guru yang latar belakang pendidikannya tidak relevan dengan mata pelajaran yang diajarkannya. -56,51% guru masih belum berkelayakan (berkualifikasi pendidikannya D1, D2, & PGSLP) -Khusus SLTP 5 Bdg. 79% belum berkelayakan (SLTA-D2). -masih ada beban mengajar 36 jam/minggu -Ada guru yang selama 10 tahun tinggal jauh dari sekolah (lebih dari 140 km). Karenanya ia ia sering bolos tugas. -Guru lebih tertarik untuk tinggal dan mengajar di kota.

ASPEK	KEKUATAN	KELEMAHAN
6. Layanan siswa	<ul style="list-style-type: none"> -Sebagian besar guru BP/BK telah memenuhi kualifikasi. -Tiap sekolah umumnya memiliki Koposis. -Masyarakat sekitar SLTP di daerah transmigrasi membantu menyediakan pemondokan bagi siswa. -Program UKS di tiap sekolah bekerjasama dengan Puskesmas setempat -Tiap sekolah mempunyai unit kegiatan : (Pramuka, PMR, PKS, dan Paskibraka). 	<ul style="list-style-type: none"> -Siswa SLTP di kota lebih banyak bermasalah dibanding siswa SLTP di daerah. -Tingkat kegagalan penanganannya semakin tinggi. -Masalah yang dihadapi siswa: (keluarga, hubungan antar siswa, prestasi belajar, ekonomi dan kesehatan).
7. Keuangan Sekolah	<ul style="list-style-type: none"> -Tiap sekolah menyusun RAPBS -68% biaya sekolah diperoleh dari APBN, 32% dari BP3. -Unit cost tertinggi : Rp.524.413,-/ha; terendah Rp.174.525,- -SLTP swasta sepenuhnya dibiayai swasta. -Dana APBN sesuai dengan usulan. -Masyarakat (BP3) sangat berperan dalam mendukung pembiayaan pendidikan. 	<ul style="list-style-type: none"> -Pengeluaran: Gaji & Kes. (66,5%); PBM (10%); Sar. prasarana (11%) Ekstra kur. (11%); Lis/PAM/TU (1%) -Di daerah keuangan BP3 sering menunggak. -Biaya-biaya yang terasa memberatkan sebagian masyarakat, antara lain iuran: (siswa baru, seragam, bangunan, karyawisata, OSIS, dan pelajaran tambahan/les).
8. Hubungan Sekolah dan Masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> -Pelibatan masy./BP3 dalam menyusun RAPBS -Pelibatan potensi masyarakat untuk kepentingan pengajaran di sekolah/kelas. -Pameran hasil karya siswa oleh sekolah-sekolah yang mapan. 	<ul style="list-style-type: none"> -Forum kerjasama masih sangat terbatas. -Kerjasama antara sekolah dan masyarakat masih perlu ditingkatkan lagi.

ASPEK	KEKUATAN	KELEMAHAN
9. Hubungan/Suasana Sekolah	<ul style="list-style-type: none"> -Hubungan kerja secara umum cukup harmonis -Hubungan kekeluargaan, antar/pribadi cukup baik. -Kepala sekolah umumnya bersifat terbuka. -Musyawarah merupakan harapan banyak pihak dalam menyelesaikan masalah. -Acara-acara yang bersifat kekeluargaan diadakan secara rutin dan insidental. 	<ul style="list-style-type: none"> -Kelompok-kelompok interest tetap ada, tapi dalam batas-batas yang masih wajar, dan dapat diarahkan ke arah yang positif. -Suasana kerja di tiap sekolah secara umum masih perlu ditingkatkan.
10. Pemecahan masalah & Pembuatan Keputusan.	<ul style="list-style-type: none"> -Guru selalu dilibatkan dalam pembuatan keputusan dalam hal: (PMB, pembagian tugas, pengemb. kurikulum, pengemb. karir dsb.) -BP3 selalu dilibatkan dalam pemecahan masalah dan pembuatan keputusan, penyiapan kurikulum mulok, dan pembiayaan sekolah. -Siswa dilibatkan dalam pengambilan keputusan dalam hal pelanggaran disiplin, sanksi, dan keag. ekstra-kurikuler. 	<ul style="list-style-type: none"> -Pemanfaatan data pendukung bagi pengambilan keputusan dan pemecahan masalah masih perlu ditingkatkan/diberdayakan. -Data persekolahan belum ditata dengan baik, agar berguna untuk pengambilan keputusan.
11. Penelitian dan Pengembangan Sekolah.	<ul style="list-style-type: none"> -Pengembangan sekolah didasarkan atas hasil evaluasi dan kajian bersama. 	<ul style="list-style-type: none"> -Secara khusus belum ada program penelitian pengembangan sekolah. -Ketiadaan program penelitian & pengembangan sekolah, diduga sebagai salah satu penyebab rendahnya mutu pend. persekolahan.

ASPEK	KEKUATAN	KELEMAHAN
<p>Sistem Informasi & Manajemen Wajar Dikdas.</p> <p>1. Akurasi Data & Informasi Manajemen Dikdasmen</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Untuk tingkat propinsi dan kabupaten dapat memanfaatkan saluran telepon/fax, guna mempercepat akses data dan informasi. -Di tingkat propinsi data tersedia dan tertata dengan baik. -Data disiapkan untuk bahan pengambilan keputusan. 	<ul style="list-style-type: none"> -Di tingkat Kab./Kec. data kurang tertata dengan baik, dan kurang lengkap. -Data dihimpun dan disiapkan jika ada permintaan dari kanwil, atau format dari pusat. -Belum ada jadwal dan mekanisme penyampaian data, informasi, dan laporan yang sudah dah disepakati untuk dipedomani bersama. -Alasan keterlambatan: <ul style="list-style-type: none"> =jarak sekolah ke kec./kab., kondisi alam =sarana penunjang & tenaga "kurang".
<p>2. Struktur organisasi dan tata kerja</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Struktur organisasi tim kordinasi wajar dikdas disusun sesuai dengan Kep. Menko Kesra No. 18/1994. -Komposisi struktur lengkap & ek-offisio. -Staf yang berprestasi dan berwawasan baik menunjukkan kinerja yang lebih baik, lebih cepat terpilih untuk berkarir di kanwil. 	<ul style="list-style-type: none"> -Kordinasi belum terwujud sebagaimana mestinya, karena: <ul style="list-style-type: none"> =ketidakjelasan tujuan bagi setiap anggota. =ada distorsi komunikasi atasan-bawahan di masing-masing instansi asal. =pemanfaatan sumber-sumber belum efektif. =keterlibatan anggota diluar dikbud kurang, bahkan cenderung menghindari. =suasana kerja kurang kondusif. =org. bersifat adhoc, sementara, dan semu. =anggota tim kurang adaptabel terhadap tugas-tugas tim.

ASPEK	KEKUATAN	KELEMAHAN
<p>3. Kinerja Pokja Wajar</p>	<p>-Langkah persiapan: ⇒membentuk tim secara berjenjang (Prop.Kab./Kec, Kecamatan). ⇒pendataan, pemetaan dan analisis posisi. -Pokja dikendalikan langsung oleh KDH -Anggota tim adalah pejabat instansi/bagian yang terkait. -Landasan operasional jelas dan memadai. -Ruang sekretariat tkt propinsi memadai tapi pemanfaatannya belum optimal.</p>	<p>-Staf di kandep dan kancam terbiasa bekerja atas perintah/permintaan, kurang inisiatif, tak dapat menarik pelajaran dari pengalaman. -Banyak staf merasa puas dengan kedudukannya sebagai PNS, motif berprestasi kurang. -Intensitas perhatian dan implementasi program "stagnan", bila ada pergantian pejabat instansi terkait. -Kinerja tim belum optimal. -Anggota tim selalu mewakilkan kewajiban menghadiri rapat kordinasi. -Ruang sekretariat bersama di tingkat kab/kod, dan Kecamatan belum memadai.</p>

B. Pembahasan Temuan Penelitian

Pembahasan temuan penelitian ini dimaksudkan untuk menelaah kembali dan memaknai : (1) peluang dan (2) tantangan eksternal pendidikan; serta (3) kekuatan dan (4) kelemahan internal pendidikan, guna merumuskan alternatif model intervensi bagi percepatan penuntasan wajar dan peningkatan mutu dikdas di Bengkulu.

1. Peluang (p) dan Tantangan (t) Eksternal Sistem Pendidikan

- a. Wilayah Propinsi Bengkulu relatif luas dibanding dengan jumlah penduduknya, banyak tanah yang merupakan aset daerah. Sebagian besar lahan tergolong subur, dan lebih dari setengahnya dapat dibudidayakan, baik untuk pembangunan sarana umum maupun pembangunan pertanian. Keadaan tersebut dapat "mempermudah Pemda dan Kanwil dalam menata kembali sekolah-sekolah yang ada, dan dalam membangun sekolah baru di lokasi yang strategis dan sesuai dengan kriteria, serta dapat meningkatkan aksesabilitas dan mutu layanan sekolah" (p.).

Keadaan geografis Bengkulu bergelombang (berbukit dan lembah), dengan rata-rata kemiringan lebih dari 40°. Kemiringan tersebut diakibatkan oleh posisi geografis yang berada disisi barat bukit barisan dan pesisir barat pulau Sumatra. Sepanjang pantai dan perbukitan tersebut banyak terdapat bukit, lembah, dan sungai-sungai besar. Keadaan alam tersebut menyebabkan "terbentuknya kantong-kantong pemukiman penduduk, antara satu daerah dengan daerah lainnya terisolasi". Dengan demikian, SLTP yang rata-rata berada di pusat kota kecamatan sukar di jangkau oleh murid yang berasal dari pedesaan (t₁).

- b. Propinsi Bengkulu terdiri dari 4 Dati II, 31 kecamatan, 79 kelurahan dan 1.004 desa. Jumlah tersebut relatif sedikit jika dibandingkan dengan luas wilayah dan

jumlah penduduk yang ada di dalamnya. Komitmen Pemda dan Kanwil terhadap pengembangan pendidikan relatif baik. Keadaan tersebut berpeluang dapat "memudahkan aparat dalam mengelola wilayahnya (p_2); dan "lebih memungkinkan tingginya rasio layanan umum pemerintah, khususnya pendidikan (p_3). Kemampuan Pemda dan masyarakat dalam pembiayaan pendidikan masih sangat minim, dan koordinasi antar sektor dalam penyelenggaraan pemerintahan belum terjalin dengan baik. 74,15% dari jumlah desa yang ada tergolong klasifikasi swasembada (peringkat klasifikasi desa terendah) baik dilihat dari segi sarana-prasarana maupun kemampuan ekonomi masyarakatnya. Bengkulu Utara menghadapi masalah yang berat dalam mengelola dan mengembangkan wilayahnya, karena jumlah desa dan kecamatannya terbanyak, dengan wilayah terluas dibanding Dati II lainnya. Dengan demikian "tingkat layanan pemerintahan, khususnya pendidikan persekolahan menjadi sangat minim dan tidak efisien" (t_2).

- c. Penduduk Bengkulu relatif sedikit dibandingkan dengan luas wilayah dan potensi daerahnya. Penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih banyak dibandingkan dengan penduduk usia non produktif, dengan rata-rata kepadatan penduduk 69 jiwa/km². "Kehadiran transmigran cukup berpengaruh terhadap "meningkatnya aspirasi dan partisipasi pendidikan, serta penerapan sikap hidup positif bagi penduduk setempat" (p_4). Keadaan ini dapat dimanfaatkan untuk dijadikan sebagai "dasar pengambilan kebijakan *re-lokasi* transmigran/penduduk ke wilayah yang penduduknya memiliki karakteristik negatif dalam aspirasi, partisipasi, dan sikap hidup lainnya" (p_5). Dengan status sebagai daerah penerima transmigran, pertumbuhan penduduk sebesar 3,3% per tahun dinilai cukup memadai. Angka

kematian bayi menurun, sedangkan anak lahir hidup, kesehatan dan angka harapan hidup semakin membaik. Persentase penduduk usia 0-14 tahun menurun dari 41,4% pada tahun 1990 menjadi 39,4% pada tahun 1995 (p₆).

Kepadatan dan sebaran penduduk "tidak merata", terutama pada tingkat desa, dengan variasi antara 0,5 - 1.341 jiwa/km². "Pertumbuhan, persebaran dan kepadatan penduduk tersebut cenderung mempersulit pengalokasian pembangunan sekolah baru (t₃). Hambatan lain dilihat dari segi kependudukan adalah "rendahnya tingkat pendidikan penduduk" (t₄), dimana 41% diantaranya belum tamat SD, sekitar 30% tamat SD, dan hanya sebagian kecil yang dapat menamatkan pendidikannya sampai dengan SLTA. Oleh karena itu, "kebutuhan terhadap pendidikan akan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan perbaikan taraf hidupnya (t₅).

- d. Pertumbuhan ekonomi Bengkulu di atas rata-rata nasional (14,2%) per tahun. Pertanian merupakan sektor ekonomi utama, dan industri yang mempunyai peluang berkembang adalah industri pengolahan hasil pertanian. Produksi hasil pertanian tanaman pangan turun 2,46% per tahun, sedangkan tanaman palawija mengalami kenaikan. Perkebunan "kopi dan karet" merupakan milik rakyat. Sebagian kecil lainnya tergolong PTP atau PIR (karet, kelapa sawit dan coklat). Pengolahan pasca panen dan ekspor karet dan kopi masih dilakukan di luar propinsi (Sumatra Selatan dan Lampung), sehingga nilai tambah hasil pertanian banyak dinikmati pedagang besar luar propinsi. Angkatan kerja sebanyak 64% dari seluruh jumlah penduduk, angkatan kerja yang bekerja sebanyak 61,35%, sedangkan pekerja yang bukan angkatan kerja 36,45%. Oleh karena itu, "kinerja

ekonomi khususnya di bidang pertanian masih dapat ditingkatkan seiring dengan meningkatnya pendidikan angkatan kerja, dan terbukanya kesempatan berwira-usaha baginya (p₇).

Sektor industri belum berkembang, karena sedikitnya investor yang mau menanamkan modal di Bengkulu. Sektor industri belum berkembang, karena sedikitnya investor yang mau menanamkan modalnya di Bengkulu. Agro-industri-pun belum dikenal masyarakat, kemitraan penduduk dengan PIR kurang didasari oleh sikap saling percaya dan saling menguntungkan; Sebagian besar ekspor kopi dan karet merupakan hasil perkebunan rakyat, coklat dan kelapa sawit dari PIR, dan kayu olahan sebagai hasil hutan, dalam dua tahun terakhir nilai ekspornya menurun tajam; "Dukungan dunia usaha terhadap sektor pendidikan masih rendah atau bahkan kurang mendukung (t₆); Penduduk angkatan kerja yang menganggur sebanyak 5,19%. "Semakin tinggi tingkat pendidikan semakin banyak yang melamar kerja (tergantung pada pihak luar) dan semakin banyak pula yang tidak diterimanya (t₇). Dari 27.216 pelamar, yang berhasil ditempatkan hanya 2.776 (10,2%), 64,9% dari penghasilan penduduk dikeluarkan untuk kepentingan pangan, sedangkan 31,5% lainnya untuk keperluan non-makanan, maka "pengeluaran pendidikanpun belum menjadi prioritas" (t₈). Agro-industri-pun belum banyak dikenal masyarakat, kemitraan penduduk dengan PIR kurang didasari sikap saling percaya dan saling menguntungkan; Sebagian besar ekspor kopi dan karet merupakan hasil perkebunan rakyat, coklat dan kelapa sawit dari PIR, dan kayu olahan sebagai hasil hutan, dalam dua tahun terakhir nilai ekspornya menurun tajam; "Dukungan dunia usaha terhadap sektor pendidikan masih rendah atau

bahkan kurang mendukung (t_9); Penduduk angkatan kerja yang menganggur sebanyak 5,19%. "Semakin tinggi tingkat pendidikan semakin banyak yang melamar kerja (tergantung pada pihak luar) dan semakin banyak pula yang tidak diterimanya (t_{10}). Dari 27.216 pelamar, yang berhasil ditempatkan hanya 2.776 (10,2%). 64,9% dari penghasilan penduduk dikeluarkan untuk kepentingan pangan, sedangkan 31,5% lainnya untuk keperluan non-makanan, maka "pengeluaran pendidikanpun belum menjadi prioritas" (t_{11}).

- e. Sarana keagamaan yang tersebar sampai ke pelosok desa dapat "dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan pendidikan persekolahan, dan untuk menyampaikan pesan-pesan moral guna mendukung pembangunan secara umum (p_9). Peningkatan pendidikan masyarakat khususnya pendidikan keagamaan juga dapat dilakukan melalui lembaga-lembaga dalam masyarakat yang berbasis agama, terutama mesjid dan langgar (p_9).

Sarana keagamaan yang tersebar sampai ke pelosok pedesaan "belum dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung program pendidikan persekolahan" (t_{12}). Sebagian besar jemaah haji berasal dari Kodya Bengkulu dan Rejang Lebong, hal ini menandakan bahwa "sebagian besar penduduk di 2 Dati lainnya termasuk "sosial-ekonomi lemah" (t_{13}). Kesuburan lahan di Bengkulu, menyebabkan petani setempat memiliki sikap "malas", karena merasa cukup dengan hasil alam yang melimpah (t_{14}).

- f. Sarana transportasi dan komunikasi antar propinsi dan antar kabupaten cukup memadai, bahkan semua kota kecamatan berada dalam jalur jalan negara. Sarana yang ada cukup memadai dibandingkan dengan jumlah penduduk yang memer-

lukannya. Keadaan ini justru banyak mengundang pendatang untuk berdomisili di Bengkulu, yang secara sosial-ekonomis lebih banyak mendatangkan keuntungan bagi kemajuan daerah dan penduduk setempat. Keadaan ini dapat dijadikan sebagai dasar untuk "mengarahkan pendatang guna mengisi lokasi dan posisi yang lebih menguntungkan baik bagi diri dan keluarganya, maupun bagi penduduk asal di sekitarnya" (p₁₀).

Masalah transportasi bukan terletak pada sarana dan prasarana, tetapi karena jarak yang jauh baik antar kabupaten, antar kecamatan, maupun antar desa dengan kecamatan. Selain itu, banyak desa yang selain jauh dari kota kecamatan, juga terisolir keadaan alam, yang sukar dilalui oleh kendaraan umum, walaupun ada dan bisa pengoperasian angkutan umum dipandang belum efisien dilakukan secara rutin. Sekitar 59% jalan desa belum dapat dilalui kendaraan umum. Oleh karena itu, "kendaraan umum hanya beroperasi 2 kali dalam seminggu, yaitu pada hari pasar saja" (i₁₅).

2. Kekuatan (k) dan Kelemahan (l) Internal Sistem Pendidikan

- a. Angka partisipasi pendidikan penduduk usia 7-12 tahun telah memenuhi target dengan capaian APM 96,5% dan APK 104,56 (k₁); sedangkan APM dan APK penduduk usia 13-15 tahun baru mencapai 55,68% dan 62,09%. Sedangkan berdasarkan hasil operasi sisir tahun 1994 APK sudah mencapai 70,94%. Khusus Kotamadya Bengkulu telah melampaui standar, dengan APM 106,3% (k₂).
Sedikitnya masih ada 3,5% dari penduduk usia 7-12 tahun yang belum masuk SD (l₁). Mereka tidak sekoiah bukan disebabkan oleh tidak siapnya layanan, tetapi

karena keluarga mereka pada umumnya berada di daerah terpencil atau terisolir, mereka merasa lebih "suka" seperti apa adanya, tanpa dirisaukan oleh tidak sekolahnya anak-anak mereka, dan belum dapat meyakini akan manfaat menyekolahkan anak (l_2). Masih dirasakan adanya inkonsistensi pendataan dan penggunaan formula pengolahannya, juga karena masih adanya "mental ABS dan mental proyek" (l_3).

- b. Angka melanjutkan dari SD/MI ke SLTP yang terendah menurut Dati II adalah (78,4%) yaitu Bengkulu Utara (l_4). Daya tampung SLTP di semua kabupaten dan kecamatan masih memungkinkan untuk menambah jumlah murid, apalagi jika ditambah dengan kesempatan belajar melalui SLTP Terbuka, yang telah dibuka di semua kecamatan (k_3). Makin sempit suatu wilayah, dengan penduduk yang semakin padat, maka persentase melanjutkannya semakin tinggi (k_4), dan semakin dekat ke kota suatu wilayah, maka lulusan SD/MI di wilayah itu semakin tinggi persentase melanjutkannya (k_5). Daerah yang berpenduduk jarang dan jauh dari kota cenderung banyak yang tidak sekolah dan tidak melanjutkan (l_5).
- c. Jumlah lulusan dan lulusan SD/MI yang melanjutkan ke SLTP persentasenya semakin tinggi, sesuai dengan upaya yang dilakukan (k_6). Tingkat melanjutkan ke SLTP pada tahun 1996/1997 telah mencapai 84,7% (k_7). Lulusan SD/MI yang tidak melanjutkan lebih disebabkan oleh jarak dan kondisi alam, dilihat dari sisi sekolah dapat ditafsirkan sebagai "keterbatasan daya jangkau sekolah" (l_6). Secara kumulatif jumlah lulusan SD/MI yang tidak melanjutkan dalam 6 tahun terakhir mencapai 33.642 orang (22,7%) dari semua lulusan SD/MI dalam kurun waktu tersebut (l_7).

- d. Dilihat dari sisi penyelenggara pendidikan, makin tinggi jenjang pendidikan, semakin besar peran serta swasta" (k_8). Hal ini mencerminkan kesungguhan pemerintah dalam upaya "pemerataan pendidikan, yang lebih dititikberatkan pada jenjang pendidikan dasar, dan sebuah kenyataan bahwa masyarakat memang membutuhkan lembaga-lembaga pendidikan lanjutan" (k_9). Di satu sisi, semakin besar perhatian pemerintah untuk menyediakan layanan pendidikan, di sisi lain terjadi penurunan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan dan pengadaan fasilitas pendidikan di sekolah (l_8). Implikasi lain dari kebijakan wajar dikdas adalah makin rendah jenjang sekolah makin tergantung pada sekolah negeri, sebaliknya, makin tinggi jenjang sekolah semakin besar peran serta swasta dalam penyelenggaraan pendidikan. Untuk mempertahankan keduanya maka perlu dicarikan "model subsidi silang" yang lebih adil dan dapat lebih meningkatkan partisipasi masyarakat (l_9).
- e. Efisiensi internal SD sekitar 70-80%, SLTP 66-84%, dan SLTA 62-84% (k_{10}). Artinya, semakin tinggi tingkat pendidikan semakin tidak efisien dalam mempertahankan murid hingga yang bersangkutan lulus dari sekolahnya (l_{10}). Dalam kurun waktu enam tahun terakhir masih terjadi tingkat pengulangan dan DO di SD sekitar 20-30 %, di SLTP 16-34 %, dan di SLTA antara 16 - 38 % (l_{11}). atau antara 20-30 dari 100 murid SD mengulang/DO. 16-34 dari 100 orang murid SLTP, dan dari 16-38 dari 100 murid SLTA mengulang kelas dan D.O.
- f. Rasio murid per SD masih memungkinkan untuk ditingkatkan efisiensinya, hingga ruang kelas termanfaatkan secara optimal (rasio murid ruang kelas) sampai 40 orang per ruang kelas (k_{11}). Rasio murid SLTP dan SLTA terhadap berbagai

komponen pendidikan di sekolah relatif rendah. Pada level Kanwil Depdikbud Bengkulu, jumlah guru "Cukup" dan EWMP guru dapat lebih dioptimalkan lagi (k_{12}). Utilitas komponen persekolahan di tingkat SD "rendah", dan memungkinkan untuk dapat ditingkatkan efisiensinya, hingga ruang kelas termanfaatkan secara optimal. Sedangkan untuk jenjang SLTP dan SLTA utilitas ruang kelas sudah optimal, kecuali jika digunakan dalam 2 shift.

- g. Tenaga administrasi di lingkungan Kanwil Depdikbud Bengkulu sebanyak 2.527 orang, terdiri dari 1,57% golongan IV, 32,94% golongan III, 55,51% golongan II, dan 7,774% golongan I. Tenaga edukatif sebanyak 16.827 terdiri dari 0,36% golongan IV, 30,76 % golongan III, dan 66,88% golongan II. Jumlah tenaga guru yang ada "cukup memadai", jumlah guru perlu ditambah jika memperhitungkan kebutuhan pembangunan yang sedang berlangsung dan pengganti bagi guru yang pensiun (k_{13}). Kebijakan "zero growth" direalisasikan dari kebutuhan guru yang terhitung mendesak (k_{14}).
- h. Tiap pengawas TK/SD rata-rata membina 16,8 sekolah; 125,3 guru; 2.378 murid; 105,3 kelas; 82,78 ruang kelas. Tiap pengawas SM membina 14,3 sekolah; 276,3 guru; 4.287 murid; 113,8 kelas; dan 97,8 ruang kelas. Beban tugas pengawas jauh lebih berat dibandingkan dengan kriteria rentang tugas kepengawasan (l_{12}), setiap pengawas SM rata-rata membina 15 unit sekolah, menurut kriteria seorang pengawas membina 8 sekolah, dengan pertimbangan bahwa setiap pengawas dapat melaksanakan 2 hari kunjungan ke satu sekolah, sehingga selama 3 minggu para pengawas berdinam di lapangan, selebihnya bekerja di kantor. Kekurangan pengawas hampir 2 x lipat dari jumlah yang ada saat ini (l_{13}).

- i. Selain masih terdapat kekurangan guru, di beberapa sekolah juga terdapat kelebihan guru pada beberapa mata pelajaran tertentu. Di SD tercatat selain perlu tambahan 743 guru kelas, 139 guru agama, dan 583 guru penjaskes; juga masih ada kelebihan guru di beberapa sekolah, yaitu kelebihan 483 guru kelas, 101 guru agama, dan 36 guru penjaskes. Untuk jenjang SLTP, terdapat 3.098 guru, dibutuhkan 5.322 guru, tercatat kekurangan guru dari berbagai mata pelajaran sebanyak 1.403 orang (l_{14}). Selain masih kurang guru SLTP, juga ada kelebihan untuk beberapa mata pelajaran tertentu (k_{15}), yaitu kelebihan guru PMP, keterampilan, dan guru tidak tepat ajar. Sedangkan di SLTA terdapat kekurangan guru sebanyak 308 orang untuk 11 mata pelajaran, dan kelebihan guru lain-lain sebanyak 67 orang. Kelebihan tersebut diakibatkan oleh ketidaksesuaian antara latar belakang pendidikan dengan bidang pengajarannya, tak ada bidang studi yang cocok dengan latar belakang pendidikannya, atau karena pemerataan penempatan saja yang perlu ditata ulang (l_{15}). Kecukupan jumlah guru dan ketepatan kualifikasi pendidikannya merupakan kunci keberhasilan pengajaran di sekolah (k_{16}). Sekolah-sekolah yang mempunyai guru mata pelajaran yang cukup dengan kualifikasi pendidikan yang sesuai dapat menghasilkan prestasi belajar yang jauh lebih baik (k_{17}) dibandingkan dengan sekolah sekolah yang kualifikasi gurunya kurang sesuai, atau bahkan sekolah yang tidak memiliki guru mata pelajaran tersebut (l_{16}).
- j. Pengangkatan tenaga edukatif tetap dibuka walaupun ada kebijakan "zero growth" pengangkatan pegawai (k_{18}), jumlahnya tergantung anggaran yang tersedia. Jumlah guru yang diangkat pada golongan III cenderung makin banyak, hal ini menunjuk-

kan diberlakukannya ketentuan bahwa calon guru yang diangkat minimal berpendidikan SI(k₁₉). Calon guru yang ada pada umumnya berlatar belakang pendidikan yang "jenuh" pengangkatannya.

- k. Baik di SD, SLTP, maupun SLTA masih diperlukan tambahan ruang kelas atau unit gedung baru untuk mengganti ruang kelas yang rusak, dan untuk meningkatkan daya tampung sekolah (I₁₇), sehingga aspirasi melanjutkan dapat tersalurkan, baik bagi lulusan SD/MI maupun lulusan SLTP.
- k. Walaupun belum semua SD memiliki enam ruang kelas, namun tiap ruang kelas yang ada saat ini rata-rata dimanfaatkan oleh 29 murid (I₁₈). Di SLTP rata-rata telah memiliki lebih dari enam ruang kelas, dengan rata-rata hunian 42 orang per ruang kelas. Sedangkan di SLTA, tiap sekolah rata-rata memiliki lebih dari 7 ruang kelas, dengan tingkat utilitas 39,33 murid per ruang kelas.

3. Kekuatan dan Kelemahan Sistem Informasi Manajemen Wajar Dikdas

- a. Data dan informasi pendidikan di tingkat kabupaten, kecamatan dan sekolah cenderung kurang lengkap. Mereka membuat laporan hanya untuk memenuhi permintaan ordinasi di atasnya. Belum ada jadwal dan mekanisme pendataan yang konsisten dan teratur, walaupun ada cenderung tidak terealisasi sebagaimana mestinya. Beberapa alasan keterlambatan pelaporan data dan informasi antara lain karena jarak, kondisi alam, dan sarana penunjang yang minim (I₁₉).
- b. Koordinasi belum terwujud sebagaimana mestinya, karena ketidakjelasan visi, misi, dan tujuan melakukan koordinasi, masih adanya distorsi komunikasi antara atasan-bawahan di masing-masing instansi asal, pemanfaatan sumber-sumber yang

- ada belum efektif, keterlibatan anggota dari luar Dikbud "kurang" atau bahkan nyaris tidak ada, dan cenderung menghindar, fasilitas kerja yang kurang memadai, organisasi yang bersifat adhoc dan tentatif, serta anggota tim yang kurang mampu mengadaptasi tugas-tugasnya (I_{20}). Kebiasaan bekerja atas perintah atau permintaan atasan, inisiatif kerja sangat kurang, dan banyak petugas yang merasa puas dengan statusnya sebagai PNS, tanpa mampu menunjukkan kinerja yang baik (I_{21}). Penulis menilai bahwa hal tersebut merupakan akibat dari budaya kerja perencanaan dan manajemen yang bersifat "top down", yang berlaku selama ini.
- c. Kinerja tim yang belum optimal, anggota tim seringkali mewakili rapat koordinasi kepada bawahannya. Di tingkat kabupaten dan kecamatan, rata-rata belum memiliki ruang sekretariat bersama, dan jika ada pergantian pejabat terkait maka tugas-tugas koordinasi cenderung terputus (I_{22}).
- d. Akurasi data dan informasi pendidikan di tingkat propinsi telah tersedia dan tertata dengan baik. Data dan informasi tersebut sengaja disiapkan untuk pengambilan keputusan dalam penyusunan program dan penetapan kebijakan di lingkungan Kanwil Depdikbud (k_{20}). Di tingkat kabupaten dan kecamatan data dihimpun dan diolah untuk kepentingan laporan (sesuai dengan permintaan dari Kanwil), akurasinya kurang meyakinkan, karena data dari sekolah-sekolah seringkali terlambat (I_{23}).
- e. Struktur organisasi tim koordinasi wajar dikdas disusun sesuai dengan Kepmenko Kesra Nomor 18/Tahun 1994. Komposisi struktur diisi oleh para pejabat lintas sektoral terkait secara *eks-officio*. Staf yang berasal dari Kanwil Depdikbud berperan lebih aktif, bahkan dipandang sebagai yang paling bertanggungjawab atas



suksesnya Wajar Dikdas (k_{21}), sementara staf dari instansi lain cenderung lalai terhadap tugas-tugas yang menjadi tanggungjawabnya (l_{24}).

- f. Pembentukan tim secara berjenjang, adanya landasan operasional yang jelas, mengadakan pendataan, pemetaan, dan analisis posisi pendidikan, ketersediaan sekretariat, dan keberadaan kelompok kerja yang dikendalikan langsung oleh Kepala Daerah merupakan hal-hal positif yang harus tetap dipelihara dan diupayakan seoptimal mungkin.

4. Keunggulan (k) dan Kelemahan (l) Implementasi Perencanaan dan Manajemen di SLTP

Pembahasan temuan hasil studi kasus tentang "implementasi perencanaan dan manajemen SLTP" ini lebih diarahkan untuk kepentingan perbaikan mutu pendidikan pada tataran sekolah, khususnya SLTP, yang didasarkan pada kondisi obyektif di lapangan. Sampel (kasus) yang diobservasi dalam penelitian ini meliputi 2 (dua) SLTP di Bengkulu, 2 (dua) SLTP di Ujung Pandang, dan 3 (tiga) SLTP di Jawa Barat. Pengambilan sampel di luar Bengkulu dimaksudkan untuk memperoleh bahan perbandingan tentang keunggulan dan kelemahan dalam implementasi perencanaan dan manajemen sekolah, serta mengidentifikasi perbedaan antara sekolah yang memiliki kinerja baik dengan sekolah yang kinerjanya kurang baik.

a. Karakteristik Umum

Sekolah yang kinerjanya baik ditandai oleh budaya yang kondusif bagi terciptanya persaingan dalam belajar (k_{22}); dipimpin oleh KS yang memiliki visi dan

misi yang jelas tentang sekolahnya (k_{23}); KS yang kreatif dan dinamis (k_{24}); KS berperan sebagai fasilitator bagi guru-guru di sekolahnya (k_{25}); sekolah sangat diminati oleh masyarakat sekitar dan menjadi sekolah favorit (k_{26}); dan siswa sekolah unggul sebagian besar berasal dari keluarga yang tergolong "menengah ke atas" (k_{27}).

Sekolah yang kinerjanya kurang baik ditandai oleh budaya akademik yang kurang menunjang terciptanya persaingan dalam belajar (l_{24}); KS belum memiliki visi dan misi yang jelas tentang sekolahnya (l_{25}); KS yang kurang kreatif dan tidak dapat mengantisipasi kebutuhan civitas sekolah ataupun kebutuhan pemakai (l_{26}); sumberdaya penunjangnya serba minim (l_{27}); dan secara umum siswanya berasal dari keluarga yang tergolong "menengah ke bawah" (l_{28}). Suasana yang kondusif bagi terciptanya persaingan belajar dipengaruhi oleh faktor: (a) kejelasan visi dan misi sekolah; (b) kreativitas dan kapabilitas KS dalam kapasitasnya sebagai pemimpin, fasilitator, dan supervisor; serta (c) dukungan penuh dari seluruh civitas sekolah dan orang tua murid.

b. Kemuridan

Sekolah yang kinerjanya baik: menyeleksi calon murid yang mempunyai NEM tinggi (k_{28}); menolak sebagian pendaftar yang memiliki NEM rendah (k_{29}); semangat belajar murid tinggi (k_{30}); prestasi belajar murid tinggi (k_{31}); sebagian besar murid berasal dari keluarga berpendidikan cukup dan sosial ekonomi menengah ke atas (k_{32}); jumlah murid sesuai dengan kapasitas sekolah (k_{33}); disiplin murid tinggi (k_{34}); hampir semua lulusannya melanjutkan dan diterima di SLTA negeri (k_{35}); jumlah pendaftar setiap tahunnya bertambah (k_{36}).

Sekolah yang kinerjanya kurang baik: murid yang diterima NEM nya lebih rendah dibanding murid yang diterima di sekolah lain (l_{29}); semua pendaftar umumnya diterima, atau yang ditolak relatif sedikit (l_{30}); semangat belajar murid dan tingkat persaingannya rendah (l_{31}); prestasi belajar murid pada umumnya rendah (l_{32}); murid berasal dari keluarga yang pendidikan formalnya rendah (l_{33}); jumlah murid cenderung melebihi kapasitas sekolah (l_{34}); pendaftar ke swasta yang belum baik cenderung berkurang (l_{35}); disiplin murid kurang terpelihara, karena sering bebas (l_{35}); murid yang masuk sekitar 65% dari jumlah pendaftar (l_{37}).

c. Kurikulum dan Pengajaran

Setiap sekolah menggunakan GBPP yang sama, dan jumlahnya cukup memadai. Implementasinya dalam bentuk rencana pelajaran, satuan pelajaran, pelaksanaan pengajaran, dan tindak lanjut atas hasil evaluasi belajar berbeda-beda di tiap sekolahnya, bahkan antar guru dalam satu sekolah juga kadang berbeda. Di sekolah yang memiliki kinerja baik, pendekatan yang digunakan dalam mengajar lebih bervariasi (k_{37}), dan suasana belajarnya lebih kompetitif (k_{38}), waktu belajar yang digunakan lebih padat (k_{39}), ada pemberian tugas tambahan (k_{40}), ada pengajaran remedial, dan evaluasi susulan (k_{41}), dengan hasil yang cukup baik (60-90%). Penyelenggaraan mulok disesuaikan dengan harapan masyarakat (BP3), potensi sekolah, dan potensi masyarakat sekitar (k_{43}). Supervisi pengajaran dilaksanakan secara berkala baik oleh kepala sekolah maupun pengawas (k_{43}).

Kegiatan-kegiatan tersebut (k_{37} , k_{43}) hampir tak pernah tercapai dengan baik

oleh sekolah yang kinerjanya rendah (l_{38}). Lemahnya implementasi kurikulum dan pengajaran berakar dari kekurangan jumlah dan kualifikasi guru (l_{39}). Adakalanya seorang guru mengajar lebih dari satu mata pelajaran, atau lebih dari satu kelas dalam waktu yang bersamaan (l_{40}). Walaupun secara metodologis dapat diterima, namun secara psikologis guru merasa bahwa hasilnya tidak optimal, terbukti dengan capaian target kurikulum berkisar antara 30-60%. Semakin memadai jumlah dan kualifikasi guru semakin baik kualitas proses belajar dan hasil-hasil yang dicapainya (k_{44}).

d. Fasilitas Sekolah

Tiap SLTP telah memiliki Lab. IPA, Perpustakaan, Lapangan olah raga/ upacara, ruang kelas, dan fasilitas lainnya. Di SLTP yang kinerjanya baik, fasilitas belajar dimanfaatkan secara optimal, dan cukup terpelihara (k_{45}). Di sekolah favorit, fasilitas sekolah amat memadai, dan banyak diantara fasilitas tersebut pengadaannya ditanggung oleh BP3 (k_{46}). Di sekolah yang kinerjanya rendah, pemanfaatan fasilitas sekolah tampak tidak optimal, alat-alatnya tidak lengkap, perawatan dan kebersihannya kurang memadai (l_{41}). Kesenjangan kepemilikan fasilitas sekolah sangat tajam, terutama dalam bentuk perpustakaan dan laboratorium. Di suatu sekolah keadaannya cukup lengkap, sementara di sekolah lainnya sangat minimal (k_{47}). Demikian juga dengan pemanfaatannya, ada sekolah yang memanfaatkan sumber-sumber belajar secara optimal, ada pula yang tidak memanfaatkan fasilitas secara tepat guna (l_{42}). Sebagai contoh, pada jam pelajaran IPA-Fisika, siswa diboyong pindah untuk belajar di laboratorium, namun apa yang terjadi, ternyata PBM di lab

tidak berbeda dengan di kelas biasa, bahkan alat-alat peraga dan alat praktik tidak disentuhnya (l_{43}).

e. Tenaga Kependidikan

Kecuali di SLTP 3 Ketahun, jumlah guru sekolah sampel sudah cukup. Sekolah-sekolah di perkotaan cenderung tidak pernah kekurangan guru (k_{48}). Dari 292 orang guru sekolah sampel, hanya 43,4% yang telah memenuhi kualifikasi pendidikan D3 dan S1 (l_{44}). Dilihat dari sisi pengalamannya, sebagian besar guru telah berpengalaman mengajar lebih dari 7 tahun, dan hanya sekitar 9,1% yang pengalamannya kurang dari 7 tahun (k_{49}). Di sekolah yang kinerjanya baik, guru-guru bebas mengikuti berbagai kegiatan untuk mengembangkan profesinya, dengan catatan, tidak mengganggu tugas pokok (k_{50}). Semangat kerja guru akan tumbuh jika mereka memperoleh penghargaan yang memadai, dan dalam kondisi yang memungkinkan sekolah dapat memberikan penghargaan itu dalam bentuk insentif tambahan ataupun pengganti uang transport (k_{51}).

Di semua sekolah sampel terdapat guru yang latar belakang pendidikannya tidak relevan dengan mata pelajaran yang diajarkannya (l_{45}). Selain itu, 56,51% guru belum berkeelayakan (l_{46}), dengan kualifikasi (D1, D2, dan PGSLTP). Di sekolah yang sudah mempunyai budaya akademik yang baik, prestasi belajar tidak banyak ditentukan oleh latar belakang pendidikan guru ataupun kepala sekolahnya (k_{52}). Sebagai contoh, 79% guru SLTP "top" di Bandung masih berpendidikan SLTA-D2. Di sekolah yang kurang guru, masih ada guru yang mengajar 36 jam per minggu (2 x beban wajib baginya). Di sekolah yang sama juga ada guru yang sudah bertugas 10

tahun tetapi tetap tinggal di kota, yang jaraknya 140 km dari sekolah, dalam kondisi seperti itu, kemungkinan bolos mengajar sukar dihindari (l_{47}). Kenyataan ini menambah bukti bahwa guru-guru sebenarnya lebih senang tinggal di kota dan sekitarnya.

f. Karakteristik Layanan Kemuridan

Layanan kemuridan di luar jam pelajaran merupakan salah satu bentuk layanan yang dapat menunjang terwujudnya iklim sekolah yang kondusif. Unit kegiatan layanan siswa yang ada di tiap sekolah antara lain BP/BK, Kopsis, UKS, Pramuka, PMR, Paskibraka, Pembinaan hobi/bakat dan prestasi, dan layanan pondokan bagi murid yang berasal dari daerah terpencil/terisolir dan jauh (k_{53}).

Murid-murid di kota besar lebih banyak bermasalah dibandingkan dengan murid di kota kecil (l_{47}), penanganan murid di kota kecil lebih mudah dibandingkan dengan penanganan murid di kota besar (k_{54}), karena itu, tingkat kegagalannya akan lebih tinggi (l_{48}). Masalah-masalah yang biasa dialami murid antara lain (berurutan): masalah keluarga, hubungan diantara murid, prestasi belajar, ekonomi, dan kesehatan.

g. Pengelolaan Keuangan Sekolah

Besar kecilnya keuangan yang diperlukan untuk pembiayaan sekolah dapat disimak dari RAPBS. Pembiayaan yang tertuang dalam RAPBS dari tujuh sekolah sampel antara lain sebagai berikut: proporsi biaya pendidikan di sekolah terdiri dari 68% dari Depdikbud/APBN dan 32% lainnya dari masyarakat/BP3 (k_{54}); Biaya sekolah swasta sepenuhnya bersumber dari masyarakat, yayasan, BP3 dan donatur

lainnya (k_{55}); Satuan biaya tertinggi per sekolah per murid sebesar Rp. 524.413,- /tahun dan terendah Rp. 174.525,- /tahun (k_{56}); Biaya pendidikan di sekolah antara lain dikeluarkan untuk gaji dan kesejahteraan pegawai 66,5%; Sarana/prasarana 11%; Ekstra kurikuler 11%; PBM 10%; lain-lain 1% (k_{57}); Beberapa jenis pungutan yang memberatkan sebagian masyarakat antara lain sumbangan murid baru, seragam, bangunan, karyawisata, osis, ekstra kurikuler, dan pelajaran tambahan (l_{49}). Besarnya persentase sumbangan masyarakat diduga berkontribusi pada prestasi belajar siswa, semakin besar persentase sumbangan masyarakat (BP3) semakin tinggi nilai rata-rata yang diperoleh murid sekolah yang bersangkutan (k_{58}).

h. Hubungan Kerja dan Suasana Sekolah

Hubungan kerja di tiap sekolah secara umum cukup harmonis, termasuk hubungan kekeluargaan, dan hubungan antar pribadi juga cukup baik. Setiap sekolah mempunyai acara yang bersifat kekeluargaan, baik rutin maupun insidental (k_{59}). Kepala sekolah pada umumnya bersikap terbuka. Kapasitas kepemimpinan yang menunjukkan ciri-ciri keunggulan amat berpengaruh terhadap terciptanya hubungan dan suasana kerja yang harmonis, dan dalam menciptakan suasana yang kompetitif diantara guru untuk dapat menyelesaikan tugas sesegera mungkin dengan produk yang paling baik (k_{60}). Kelompok-kelompok kepentingan ada di tiap sekolah, namun kelompok-kelompok tersebut masih berada dalam batas kewajaran dan dapat diarahkan untuk kepentingan yang positif (k_{61}). Musyawarah merupakan harapan banyak pihak dalam menyelesaikan masalah bersama (k_{62}).

i. Hubungan Sekolah dengan Masyarakat

Pelibatan masyarakat – khususnya BP3 dalam penyusunan RAPBS telah dilaksanakan secara transparan oleh sebagian sekolah, namun sebagian lain masih menyusun sendiri, baru meminta persetujuan dan dukungan BP3 (k_{63}). Penggalan potensi dan pelibatan masyarakat untuk kepentingan pengajaran di sekolah belum optimal (l_{50}). Jika potensi dan dukungan yang ada di masyarakat dapat dioptimalkan, maka sebagian persoalan sekolah dapat terpecahkan. Selain itu, kesan keterasingan sekolah dari masyarakatnya dapat diminimalkan. Forum kerjasama antara sekolah dengan masyarakat masih sangat terbatas, dan wujud kerjasama yang ada masih perlu ditingkatkan (l_{51}).

j. Pemecahan Masalah dan Pengambilan Keputusan

Guru-guru selalu dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, terutama keputusan berkaitan dengan penerimaan siswa baru, pembagian tugas mengajar dan tugas-tugas selain mengajar, pengembangan kurikulum, pengembangan karir guru dan sebagainya (k_{64}). Selain guru, BP3 – khususnya pengurus BP3 selalu dilibatkan dalam pemecahan masalah dan pembuatan keputusan, terutama dalam penentuan "kurikulum muatan lokal" dan pembiayaan sekolah (k_{65}). Sedangkan siswa dilibatkan dalam pengambilan keputusan terutama berkaitan dengan disiplin siswa dan kegiatan ekstra kurikuler (k_{66}). Pemecahan masalah dan pengambilan keputusan masih jarang yang didukung oleh data yang akurat (l_{52}). Data yang ada di sekolah umumnya tersimpan dalam bentuk arsip dan dokumen, hanya sebagian kecil saja, dan hanya di sekolah-sekolah tertentu yang sempat menyajikan data dalam wujud yang cukup menarik (l_{53}).

k. Penelitian dan Pengembangan Sekolah.

Pengembangan sekolah yang dilakukan selama ini didasarkan atas hasil evaluasi dan kajian yang dilakukan secara bersama, sarasanya terbatas pada pengembangan fisik sekolah (1₅₄). Sejah ini, upaya pengembangan non fisik untuk kepentingan perbaikan mutu belum digarap secara apik. Penelitian belum dijadikan sebagai salah satu teknik untuk mengembangkan sekolah, demikian juga untuk kepentingan perbaikan pengajaran. Bagi guru SLTP, penelitian masih merupakan sesuatu yang luar biasa. Secara khusus belum ada program penelitian dan pengembangan sekolah. Ketiadaan program tersebut diduga sebagai salah satu jawaban atas pertanyaan mengapa mutu pendidikan persekolahan masih rendah (1₅₅).

